



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA
ALOKASI UMUM DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN
ANGGARAN TERHADAP PERILAKU
OPORTUNISTIK PENYUSUNAN ANGGARAN PADA
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

WIDYA VISCA BIANTORO
1715100228

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : WIDYA VISCA BIANTORO
NPM : 1715100228
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S 1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA
ALOKASI UMUM DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN
ANGGARAN TERHADAP PERILAKU
OPORTUNISTIK PENYUSUNAN ANGGARAN
PADA PEMERINTAHAN DAERAH

MEDAN, 14 SEPTEMBER 2021

KETUA PROGRAM STUDI

(Dr. Rahima Br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA)

PEMBIMBING I

(Dr. Rahima Br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA)

DEKAN



(Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn)

PEMBIMBING II

(Dra Mariyam, Ak., M.Si., CA)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N**

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN SARJANA
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : WIDYA VISCA BIANTORO
NPM : 1715100228
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : SI (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA
ALOKASI UMUM DAN SISA LEBIH
PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP
PERILAKU OPORTUNISTIK PENYUSUNAN
ANGGRAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA
UTARA

MEDAN, 02 SEPTEMBER 2021

KETUA

(Bagus Handoko, SE., M.Si)

ANGGOTA I

(Dr. Rahima Br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA)

ANGGOTA II

(Dra. Maryam, Ak, Msi., CA)

ANGGOTA III

(Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si)

ANGGOTA IV

(Dito Aditia Darma Nst, SE., MMSi)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO. BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
 PROGRAM STUDI MANAJEMEN
 PROGRAM STUDI AKUNTANSI
 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
 PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

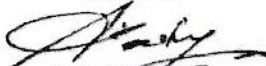
Nama Lengkap : WIDYA VISCA BIANTORO
 Tempat / Tgl. Lahir : MEDAN / 11 Desember 1999
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1715100228
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 140 SKS, IPK 3.44
 Nomor Hp : 082261144305
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :


No.	Judul
1.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap perilaku oportunistik penyusunan Anggaran pada pemerintahan daerah Kabupaten/kota Di Provinsi Sumatera Utara0


Keterangan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

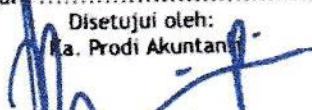
Coret Yang Tidak Perlu

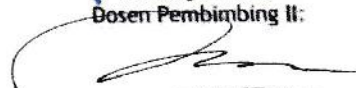

 Rektor I,
 (Cahyo Pramono, S.E., M.M.)

Medan, 26 Februari 2021
 Pemohon,

 (Widya Visca Biantoro)

Tanggal :
 Disahkan oleh :

 (Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Dr. Rahim Purba, SE., M.Si., Ak., CA.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Akuntansi :

 (Dr. Rahim Purba, SE., M.Si., Ak., CA.)

Tanggal : 26 Februari 2021
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 (Dra. Mariyam, Ak., M.Si., CA.)

No. Dokumen: FA-UPBM-18-02	Revisi: 0	Tgl. Eff: 22 Oktober 2018
----------------------------	-----------	---------------------------



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : WIDYA VISCA BIANTORO
NPM : 1715100228
Program Studi : Akuntansi
Tingkat Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Dra Mariyam, Ak, MSi., CA
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap perilaku oportunistik penyusunan Anggaran pada pemerintahan daerah Kabupaten/kota Di Provinsi Sumatera Utara0

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
7 Mei 2021	Sudah di ACC pada 7 Mai 2021 untuk Sempro	Disetujui	
3 Agustus 2021	ACC Meja Hijau	Disetujui	

Medan, 23 September 2021
Dosen Pembimbing,



Dra Mariyam, Ak, MSi., CA



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA
Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : WIDYA VISCA BIANTORO
NPM : 1715100228
Program Studi : Akuntansi
Tingkat Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Dr Rahima br. Purba, SE.,M.Si., Ak.,CA.
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap perilaku oportunistik penyusunan Anggaran pada pemerintahan daerah Kabupaten/kota Di Provinsi Sumatera Utara0

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
18 Mei 2021	ACC Sempro	Disetujui	
13 Agustus 2021	ACC Sidang	Disetujui	
14 September 2021	ACC Jilid Lux	Disetujui	

Medan, 23 September 2021
Dosen Pembimbing,



Dr Rahima br. Purba, SE.,M.Si., Ak.,CA.



SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 397/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan saudara/i:

: WIDYA VISCA BIANTORO

: 1715100228

Semester : Akhir

: SOSIAL SAINS

Prodi : Akuntansi

nya terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 12 Agustus 2021

Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan




Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

Numen : FM-PERPUS-06-01

: 01

aktif : 04 Juni 2015

[blanket_cover]

Plagiarism Detector v. 1857 - Originality Report 0/13/2021 8:58:09 PM

WIDYA VISCA BIANTORO_1715100228_Akuntansi.docx Uploaded to Universitas Pembangunan Panca Budi_Licensed02

- 1 Comparison Passed Rewrite
- 2 Detected Intergroup
- 3 Check type Internet Check



Download document study material

- 1 Revision group



SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER


Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

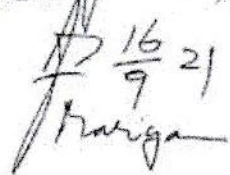
NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

Acc jilid lux
14/9-2021




Acc jilid lux
16/9/21


**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA
ALOKASI UMUM DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN
ANGGARAN TERHADAP PERILAKU
OPORTUNISTIK PENYUSUNAN ANGGARAN PADA
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

WIDYA VISCA BIANTORO

1715100228

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 23 September 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WIDYA VISCA BIANTORO
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 11 Desember 1999
 Nama Orang Tua : AHMAD BINTORO
 N. P. M : 1715100228
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Akuntansi
 No. HP : 082261144305
 Alamat : Jl. Beringin IX No.22

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Alokasi umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap perilaku oportunistik penyusunan Anggaran pada pemerintahan daerah Kabupaten/kota Di Provinsi Sumatera Utara**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setes lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Tertampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Tertampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Tertampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkrip sebanyak 1 lembar.
7. Tertampir pelunasan kwintansi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (b dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi oleh pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Tertampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :



Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



WIDYA VISCA BIANTORO
 1715100228

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend. Gatot Subroto Km.4,5 Telp.(061) 30106060 PO.BOX.1099 Medan.

Email : admin_fe@unpab.pancabudi.org

<http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UNIV / PTS : UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing I : Dr. Rahima Br. Purba, S.E., M.Si., Ak., Ca
Nama Mahasiswa : Widya Visca Biantoro
Jurusan / Program Studi : Akuntansi Publik
No. Stambuk / NPM : 1715100228
Jenjang Pendidikan : Strata I
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
26/7-2021	Pembahasan di pendakan		
30/7-2021	jumlah ditambah		
03/08-2021	Acc Sidang		

Medan,
Diketahui / Disetujui Oleh :
Ka. Prodi

Dr. Rahima Br. Purba, S.E., M.Si., Ak., Ca

Dosen Pembimbing I

Dr. Rahima Br. Purba, S.E., M.Si., Ak., Ca

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Widya Visca Biantoro
NPM : 1715100228
Fakultas/Program Studi : SOSIAL SAINS/AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH,
DANA ALOKASI UMUM DAN SISA LEBIH
PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP
PERILAKU OPORTUNISTIK PENYUSUNAN
ANGGARAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
SUMATERA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 31 Juli 2021



Widya Visca Biantoro
1715100228

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Widya Visca biantoro
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 11 Desember 1999
NPM : 1715100228
Fakultas : SOSIAL, SAINS
Program Studi : AKUNTANSI
Alamat : Jl. Beringin IX No. 22

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Pembangunan Panca Budi.

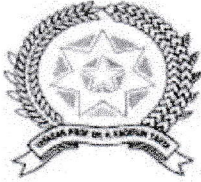
Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 31 Juli 2021



Widya Visca Biantoro
NPM : 1715100228



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp. (061) 30106060 PO.BOX.1099 Medan.

Email : admin_fe@unpab.pancabudi.org

<http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UNIV / PTS : UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
 Fakultas : Sosial Sains
 Dosen Pembimbing II : Dra. Mariyam . Ak.,M.Si,CA
 Nama Mahasiswa : Widya Visca Biantoro
 Jurusan / Program Studi : Akuntansi Publik
 No. Stambuk / NPM : 1715100228
 Jenjang Pendidikan : Strata I
 Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
04-8-2021	1. Perbaiki kata pengantar! 2. Kesimpulan Batal. 324 -- berpengaruh kontrap atau negatif? dan jelaskan artinya! 3. Saran No 1 perbaiki!	[Signature]	11/8 2021
13-8-2021	Hal 2 di atas telah di perbaiki, maka lpd yang <u>ACC</u> sedang skripsi	[Signature]	13/8 2021

Medan,
 Diketahui / Disetujui Oleh :
 Ka. Prodi



Dr. Fahima Br. Purba, S.E., M.Si., Ak., Ca

Dosen Pembimbing II

[Signature] 13/8 2021

Dra. Mariyam . Ak.,M.Si,CA

ABSTRAK

Analisis penelitian untuk membuktikan apakah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran pada pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara.. Data yang digunakan adalah laporan tahunan dari masing-masing organisasi yang dipublikasikan melalui website djpk.depkeu.go.id. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *puposive sampling* dengan total sampel sebanyak 15 pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara dan data pada tahun 2017 sampai 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran pada pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara. DAU berpengaruh negatif terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran pada pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara. Silpa tidak berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran pada pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara. PAD, DAU dan Silpa secara simultan berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran pada pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci : PAD, DAU, Silpa dan Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran

ABSTRACT

Research analysis to prove whether local revenue, general allocation funds and the remaining over budget financing affect opportunistic behavior in budgeting in district/city governments in North Sumatra Province. The data used are annual reports from each organization published through the website djpk.depkeu.go.id. The analytical method used in this study is the associative method. The sampling method used was purposive sampling with a total sample of 15 district and city governments in North Sumatra Province and data from 2017 to 2019. The results of this study indicate that PAD has no effect on opportunistic behavior in budgeting in district and city governments in the province. North Sumatra. DAU has a negative effect on opportunistic behavior in budgeting in district and city governments in North Sumatra Province. Silpa does not affect the opportunistic behavior of budgeting in district and city governments in North Sumatra Province. PAD, DAU and Silpa simultaneously affect the opportunistic behavior of budgeting in district and city governments in North Sumatra Province.

Keywords : PAD, DAU, Silpa and Opportunistic Behavior in Budgeting

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih setia dan anugerah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan pembuatan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Universitas Pembangunan Panca Budi. Proposal ini berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara”**. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan SE., M.M., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Ibu Dr. Rahima Br Purba, S.E., M.Si, Ak., C.A., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberi arah dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Ibu Dra. Mariyam, Ak, M.Si., CA., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.
5. Yang tercinta kedua orang tua saya yakni Alm. Bapak Ahmad Bintoro dan Ibu Nurana yang telah memberikan kasih sayang yang tulus hingga

memberikan pendidikan yang baik untuk saya, serta seluruh keluarga yang memberikan dukungan dan motivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Kepada teman-temanku terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Terimakasih.

Medan, Agustus 2021
Penulis

Widya Visca Biantoro
1715100228

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah	6
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.5 Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 <i>Agency Theory</i> Dalam Pemerintahan.....	11
2.1.2 Teori Asimetri Informasi(<i>Asymmetry Information Theory</i>)	12
2.1.3 Moral Hazard.....	15
2.1.4 Perilaku Oportunistik pada Penyusunan Anggaran	18
2.1.5 Pendapatan Asli Daerah	21
2.1.6 Dana Alokasi Umum	22
2.1.7 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	22
2.1.8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	24
2.1.9 Proses Penyusunan APBD	25
2.2 Penelitian Sebelumnya	31
2.3 Kerangka Konseptual	32
2.4 Hipotesis	33
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	35
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	35

	3.3 Definisi Operasional Variabel	36
	3.4 Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data	37
	3.5 Teknik Pengumpulan Data	39
	2.1 Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1 Hasil Penelitian.....	45
	4.1.1 Gambaran Umum Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara	45
	4.1.2 Statistik Deskriptif.....	47
	4.1.3 Pengujian Asumsi Klasik.....	48
	4.1.4 Regresi Linier Berganda	52
	4.1.5 Uji Hipotesis	53
	4.2 Pembahasan	56
	4.2.1 Pengaruh PAD Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran	56
	4.2.2 Pengaruh DAU Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran	57
	4.2.3 Pengaruh SILPA Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran	58
	4.2.4 Pengaruh PAD, DAU dan SILPA Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran.....	60
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	5.1 Kesimpulan.....	63
	5.2 Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Daftar Penelitian Sebelumnya.....	31
Tabel 3.1 Skedul Proses penelitian	35
Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel	36
Tabel 3.3 Populasi dan Sampel.....	38
Tabel 4.1 <i>Descriptive Statistics</i>	47
Tabel 4.2 Uji Normalitas <i>One Sample Kolmogorov Smirnov Test</i>	50
Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas.....	51
Tabel 4.4 Uji Autokorelasi	52
Tabel 4.5 Regresi Linier Berganda	52
Tabel 4.6 Uji Simultan	53
Tabel 4.7 Uji Parsial.....	54
Tabel 4.8 Uji Determinasi	56

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	33
Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas	48
Gambar 4.2 PP Plot Uji Normalitas.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Mekanisme penyusunan APBD mengacu pada perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Dimana legislatif dalam hal ini adalah DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan eksekutif dalam hal ini adalah pemerintah daerah memiliki fungsi dan peran masing-masing. Hal ini menciptakan hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif (Abdullah, 2017:3). *Agency Theory* (Teori Keagenan) akan terjadi pada berbagai organisasi termasuk dalam organisasi pemerintahan dan berfokus pada persoalan ketimpangan/asimetri informasi antara pengelola (agen/pemerintah) dan publik (diwakili prinsipal/dewan). Prinsipal harus memonitor kerja agen, agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien serta tercapainya akuntabilitas publik.

Proses penyusunan anggaran merupakan tahap yang cukup rumit dan mengandung unsur politis. Selama proses penyusunan anggaran terjadi perebutan kepentingan dari berbagai pihak, baik legislatif, eksekutif, partai politik melalui kadernya di legislatif, organisasi masyarakat, pengusaha, dan rakyat kecil. Disinilah permasalahan dalam penyusunan anggaran muncul yaitu adanya *miss allocation* anggaran. Adanya peluang untuk memenuhi kepentingan pribadi dan kelompok yang menguntungkan pihak tertentu dan kesempatan melakukan korupsi (Latifah, 2018:87). Dugaan adanya *miss allocation* dalam anggaran terjadi karena politisi memiliki kepentingan pribadi dalam penganggaran. Alokasi

sumberdaya dalam anggaran mengalami distorsi ketika politisi berperilaku korup, terutama terkait dengan peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi pada proyek-proyek yang akan dibiayai dengan anggaran pemerintah, yakni pengalokasian akan lebih banyak untuk proyek-proyek yang mudah dikorupsi dan memberikan keuntungan politis bagi politisi. Terjadinya misalokasi dalam anggaran belanja pemerintah terkait dengan perilaku oportunistik politisi dan aparat pemerintah. Besarnya kewenangan legislatif dalam proses penyusunan anggaran membuka ruang bagi legislatif untuk memaksakan kepentingan pribadinya. Untuk merealisasikan kepentingan pribadinya, legislatif akan merekomendasikan eksekutif untuk menaikkan alokasi pada sektor-sektor yang mendukung kepentingannya. Legislatif cenderung mengusulkan pengurangan atas alokasi untuk pendidikan, kesehatan dan belanja publik lainnya yang tidak bersifat *job programs* dan *targetable* (Halim, 2019:57).

Sularso (2018:3) bahwa Eksekutif juga memiliki *power* yang lebih besar karena memiliki pemahaman terhadap birokrasi dan administrasi, seluruh aturan dan perundang-undangan yang melandasinya serta hubungan langsung dengan masyarakat yang telah berlangsung dalam waktu lama mengakibatkan penguasaan informasi eksekutif lebih baik dari pada legislatif. Selain lebih dominan dalam proses penyusunan anggaran, pejabat eksekutif juga bertindak sebagai pelaksana anggaran, sehingga memiliki informasi keuangan yang lebih baik dibanding pejabat legislatif. Hal inilah yang memberi peluang kepada penyusun anggaran baik legislatif maupun eksekutif untuk berperilaku oportunistik. Oportunisme bermakna bahwa ketika terjalin kerjasama antara prinsipal dan agen, kerugian prinsipal karena agen mengutamakan kepentingannya (*agent self-interest*)

kemungkinan besar akan terjadi. Perilaku oportunistik ini merupakan perilaku yang berusaha mencapai keinginan dengan segala cara bahkan cara ilegal sekalipun. Perilaku ini akan mengeksploitasi peluang keuntungan jangka pendek dengan mengorbankan keuntungan jangka panjang.

Fenomena yang ada pendapatan di Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara menurun yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masing-masing pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 15%. Juga yang bersumber dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami penurunan 25,73% (<https://sumatra.bisnis.com>). Dalam penentuan PAD legislatif akan mendorong eksekutif untuk selalu meningkatkan target sehingga dapat meningkatkan alokasi untuk program yang mendukung kepentingannya. Hal ini ditengarai sebagai perilaku oportunistik.

Kenaikan jumlah DAU dapat dimanfaatkan sebagai ruang untuk mengusulkan alokasi belanja yang baru, yang bisa berbeda dengan prioritas pengalokasian pada tahun sebelumnya. Peluang perilaku oportunistik lain ditengarai juga terjadi pada sumber pendapatan daerah yang berbentuk dana transfer pemerintah pusat, contohnya adalah Dana Alokasi Umum (DAU). DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah. DAU berperan sebagai pemerata fiskal antardaerah (*fiscal equalization*) dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah. Sularso (2018:5) bahwa DAU merupakan *block grant* yakni hibah yang penggunaannya cukup fleksibel atau tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu.

Masalah mengenai DAU yaitu tahun 2018 terjadi penangkapan Bupati Labuhan Batu Utara terkait penyelewengan dana proyek PUPR setenmpat dan pada tahun 2019 terjadi 8 kasus korupsi berkaitan dengan dana desa di provinsi Sumatera Utara. (<https://www.regional.kompas.com> & <https://www.waspada.id>).

Masalah lain dalam pengalokasian anggaran adalah tidak diperhatikannya jangka waktu penetapan perubahan APBD, yang biasanya dilakukan beberapa bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran. Hal ini menjadikan anggaran tidak efektif atau bahkan tidak terserap sepenuhnya saat tahun anggaran berakhir, dan berdampak pada tingginya SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran), dimana dana yang seharusnya dapat digunakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat ternyata tidak terserap sepenuhnya. Pada tahun 2019 dan bantuan untuk pendidikan di operasional sekolah menanggung di rekening sekolah Rp. 9,5 M dan menjadi silpa di tahun berikutnya di kabupaten Asahan. (<https://Grata.com>).

SiLPA ini memiliki pengaruh pada pengalokasian APBD periode selanjutnya, karena SiLPA akan digunakan untuk menyeimbangkan anggaran yaitu dengan menutupi pengeluaran pembiayaan. SiLPA juga bisa terjadi akibat asimetri informasi antara eksekutif dan legislatif.

Penelitian ini menggunakan pengukuran Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran (OPA) Parwati (2017) yang merupakan pengembangan

dari pengukuran Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran (OPA) yaitu dengan menghilangkan peningkatan anggaran legislatif dan menggantinya dengan peningkatan belanja hibah dan bansos dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan. Apalagi saat ini mantan Gubernur Sumatera ditetapkan menjadi tersangka dan sedang menjalani persidangan terkait kasus dana bansos. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran.

Hasil penelitian Parwati (2017) menyatakan bahwa SiLPA berpengaruh negatif terhadap perilaku oportunistik legislatif. Hal ini yang mendorong peneliti melakukan penelitian. Saat ini di Indonesia banyak mantan maupun anggota legislatif aktif serta pejabat pemerintah yang divonis bersalah oleh pengadilan karena penyalahgunaan APBD. Kemungkinan hal ini terkait dengan peran legislatif dan eksekutif yang sangat besar dalam penganggaran, terutama pada tahap perencanaan atau perumusan kebijakan anggaran dan pengesahan anggaran hingga pengalokasiannya.

Fenomena perilaku penyusun anggaran sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut, karena meskipun aturan formal tentang mekanisme penyusunan APBD telah dirancang sedemikian rupa, namun pada prakteknya masih terjadi beberapa penyimpangan. Untuk itu dipandang perlu penjelasan lebih mendalam tentang perilaku oportunistik legislatif dan juga eksekutif dalam penganggaran publik. Dengan melihat hal-hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang menentukan Perilaku Oportunistik Legislatif dan Eksekutif dalam Penganggaran Daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara”**.

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, Adapun identifikasi masalah yang akan dibahas penulis adalah:

1. Pendapatan di Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara menurun yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masing-masing pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 15%. Juga yang bersumber dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami penurunan 25,73% (<https://sumatra.bisnis.com>).
2. Tahun 2018 terjadi penangkapan Bupati Labuhan Batu Utara terkait penyelewengan dana proyek PUPR setempat dan pada tahun 2019 terjadi 8 kasus korupsi berkaitan dengan dana desa di provinsi Sumatera Utara. (<https://www.regional.kompas.com> & <https://www.waspada.id>).

3. Pada tahun 2019 dan bantuan untuk pendidikan di operasional sekolah menanggung di rekening sekolah Rp. 9,5 M dan menjadi silpa di tahun berikutnya di kabupaten Asahan. (<https://Grata.com>).

1.2.2 Batasan Masalah

Mengingat masalah yang akan dihadapi maka agar penelitian ini lebih terarah dan pembahasannya tidak menyimpang maka penulis membatasi di variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran, dalam kurun waktu tahun 2017 sampai tahun 2019.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran pada pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran pada pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran pada pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara?
4. Apakah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan sisa lebih pembiayaan anggaran secara simultan berpengaruh terhadap perilaku

oportunistik penyusunan anggaran pada pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran pada pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran pada pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui apakah sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran pada pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara.
4. Untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran pada pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada berbagai pihak diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Mengimplementasikan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan, mengembangkan pengetahuan dan wawasan peneliti sehubungan dengan pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran pada pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Menilai dan memahami perilaku oportunistik penyusunan anggaran yang terjadi dan juga sebagai rekomendasi untuk melakukan perbaikan dalam proses penyusunan anggaran.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi, informasi, dan bahan acuan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama dimasa yang akan datang. Penelitian ini juga bermanfaat untuk membuka kemungkinan pengembangan topik-topik yang berkaitan, baik yang bersifat lanjutan, melengkapi, maupun menyempurnakan.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Parwati (2015), Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia, dengan judul perilaku oportunistik penyusunan anggaran. Penelitian ini berjudul pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran pada pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada:

1. Model Penelitian : penelitian terdahulu menggunakan model regresi linier sederhana. Sedangkan penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda.
2. Variabel Penelitian : penelitian terdahulu menggunakan 1 (satu) variabel bebas yaitu PAD, 1 (satu), serta 1 (satu) variabel terikat yaitu perilaku oportunistik penyusunan anggaran. Sedangkan penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel bebas yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan sisa lebih pembiayaan anggaran, serta 1 (satu) variabel terikat yaitu perilaku oportunistik penyusunan anggaran.
3. Jumlah Observasi/data (n): peneliti terdahulu menggunakan sampel sebanyak 9 Kabupaten/Kota di Bali dan data pada tahun 2010 sampai 2014. Sedangkan penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 15 pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara dan data pada tahun 2017 sampai 2019.
4. Waktu Penelitian: penelitian terdahulu dilakukan tahun 2015 sedangkan penelitian ini tahun 2021.
5. Lokasi Penelitian: lokasi penelitian terdahulu pada Kabupaten/Kota di Bali, sedangkan penelitian ini dilakukan pada pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory* Dalam Pemerintahan

Teori yang mendasari penulisan ini adalah teori keagenan. Darise (2018), berdasarkan teori agensi mengungkapkan bahwa hubungan keagenan di pemerintahan antara eksekutif dan legislatif. Hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh legislatif sebagai wakil dari rakyat (*principal*) yang mengharuskan pihak eksekutif/pemerintah (*agent*) sebagai penyedia jasa untuk kepentingan rakyat. Teori keagenan dilandasi beberapa asumsi. Asumsi-asumsi tersebut yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi informasi. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri (*self-interest*), memiliki keterbatasan rasional (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*). Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektivitas, dan adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Asumsi informasi adalah bahwa informasi sebagai barang komoditi yang dapat diperjual-belikan. Sesuai dengan konteks penyusunan anggaran, usulan yang diajukan oleh eksekutif memiliki muatan mengutamakan kepentingan eksekutif.

Eksekutif mengajukan anggaran yang dapat memperbesar *agency*-nya, baik dari segi finansial maupun nonfinansial. Secara implisit menyatakan

bahwa anggaran juga dipergunakan oleh legislatif (politisi) untuk memenuhi *self-interest* nya. Pada akhirnya keunggulan informasi yang dimiliki oleh eksekutif yang dipergunakan untuk menyusun rancangan anggaran akan berhadapan dengan keunggulan kekuasaan (*discretionary power*) yang dimiliki oleh legislatif. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya masalah keagenan antara prinsipal dan agen. Rakyat selaku prinsipal menuntut pemerintah (*agent*) untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya melalui mekanisme pelaporan keuangan secara periodik dalam rangka menyelaraskan tujuan antara prinsipal dan agen. Laporan keuangan tersebut merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah, selanjutnya rakyat yang diwakili oleh para legislatif akan dapat mengukur, menilai sekaligus mengawasi kinerja pemerintah, yakni sejauh mana pemerintah sudah bertindak dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2.1.2 Teori Asimetri Informasi (*Asymmetry Information Theory*)

Asimetri informasi adalah kondisi dimana terjadinya ketidakseimbangan antara suatu pihak memiliki informasi yang lebih banyak daripada pihak lain atau dapat dikatakan antar atasan dan bawahan. Adanya asimetri informasi di antara eksekutif-legislatif dan legislatif-pemilih menyebabkan terbukanya ruang bagi terjadinya perilaku oportunistik dalam proses penyusunan anggaran, yang justru lebih besar daripada di dunia bisnis yang memiliki *automatic checks* berupa persaingan (Kasper, 2019). Misalnya pihak eksekutif yang melakukan

“*budgetary slack*” yang menjadi saran pihak eksekutif untuk mengamankan posisi dalam pemerintahan dimata legislatif dan masyarakat. Namun, hal yang terjadi ialah pihak eksekutif hanya demi untuk kepentingan diri sendiri (*self Interest*). Legislatif yang tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai kinerja eksekutif, sehingga legislatif tidak dapat merasakan bagaimana usaha eksekutif dalam mengambil bagian dari kontribusi pada hasil yang actual pada suatu organisasi yang menjadikan adanya asimetris informasi dalam pemerintahan. Bila terjadi asimetri informasi, agen akan menyajikan laporan keuangan yang bermanfaat bagi prinsipal, demi motivasi untuk memperoleh kompensasi yang tinggi, mempertahankan jabatan dan lain-lain (Khang, 2020). Demikian pula, bila terjadi asimetri informasi, agen membuat bias atau memanipulasi laporan keuangan sehingga dapat memperbaiki kompensasi dan reputasinya, serta ratio-ratio keuangan (Scott, 2017:13).

Situasi ini akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*), yaitu suatu kondisi di mana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak eksekutif sebagai penyedia informasi (*prepaper*) dengan pihak legislatif pada umumnya sebagai pengguna informasi (*user*). terdapat dua macam asimetri informasi yaitu:

1. *Adverse Selection*, yaitu menyembunyikan informasi, problem, atau pengambilan keputusan yang tidak optimal terjadi karena Menteri/Pimpinan Lembaga menerima informasi yang tidak akurat

mengenai aset yang berada dalam pengusaannya. Hal ini menimbulkan proses pengambilan keputusan menjadi tidak tepat. Ketidakakuratan informasi tersebut bias bersumber dari *Bottom Level Management* dimana informasi yang tidak benar itu dapat menyangkut jenis, jumlah dan status asset.

2. *Moral Hazard*, yaitu menyalahgunakan wewenang anggota legislative yang kegiatannya tidak seluruhnya tidak diketahui oleh pihak eksekutif. Adanya konflik yang terjadi antar principal dan agen untuk saling coba memanfaatkan pihak lain demi kepentingan diri sendiri.

Asimetri informasi merupakan ketidakseimbangan informasi yang dimiliki bawahan dengan informasi yang dimiliki atasan mengenai suatu unit tanggung jawab pada sebuah organisasi (Arthaswadaya, 2017:25).

Terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur asimetri Informasi yang dikembangkan Asak (2018:114), yaitu meliputi:

1. Agen memberikan informasi pada saat proses penyusunan anggaran agar target anggaran tercapaian.
2. Agen memiliki informasi yang lebih baik mengenai apa yang dapat dicapai pada bidangnya .
3. Agen memiliki informasi yang lebih baik terhadap pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.
4. Agen memiliki informasi yang baik mengenai kinerja potensial pada bidang tanggungjawabnya.
5. Agen memiliki informasi yang lebih baik mengenai biaya yang dibutuhkan organisasi pada penyusunan anggaran.

6. Informasi yang diperlukan pada SKPD selama ini sudah sesuai dengan kebutuhan.

2.1.3 Moral Hazard

2.1.3.1 Pengertian *Moral Hazard*

Menurut Darise (2018), *Moral hazard* merupakan perilaku tidak jujur dalam memberikan informasi kepada pihak lain yang membuat yang kontrak kerja sama demi untuk memenuhi keinginannya. *Physical hazard* adalah kondisi fisik yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kerugian, sementara moral hazard adalah ketidakjujuran seseorang yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kerugian. Kedua jenis hazard ini memang tidak secara serta merta menimbulkan kerugian. Namun, keduanya memberi pengaruh yang sama yaitu meningkatkan peluang atau kemungkinan berubahnya suatu risiko menjadi kerugian. Ketidakpedulian dan perilaku urakan terhadap risiko (*moral hazard*) ini agaknya merupakan faktor yang paling dominan karena kehadirannya dapat menjadi pemicu timbulnya *Moral hazard*. *Moral hazard* merupakan salah satu aspek penting yang dinilai oleh penulis dalam menyetujui pertanggung jawaban suatu objek bisnis online. Penilaian *moral hazard* lebih mengutamakan kepada karakter dan tingkah laku bertanggung. Moral hazard dalam konteks teori keagenan terjadi karena ada asimetri informasi antara *prinsipal* dengan *agent*.

Asimetri informasi merupakan ketidakseimbangan informasi antara pihak yang dapat memperoleh dan memanfaatkan informasi untuk kepentingannya dengan pihak lain yang tidak dapat memperoleh informasi yang sama. Asimetri informasi muncul sebagai akibat adanya pemisahan antara fungsi kepemilikan dan pengelolaan. Penjelasan di atas mengenai pengertian *moral hazard* merupakan beberapa penjelasan dari para ahli dalam pandangan ilmu ekonomi atau manajemen, dimana penjelasan di atas menjelaskan bahwa *moral hazard* bisa termasuk dalam kategori asimetri informasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa asimetri informasi yaitu ketidakseimbangan dalam menyampaikan informasi antara satu individu dengan lainnya yang mengakibatkan suatu kerugian disatu pihak tertentu.

2.1.3.2 Ciri-Ciri Moral Hazard

Moral Hazard adalah keadaan yang berkaitan dengan sifat, pembawaan dan karakter manusia yang dapat menambah besarnya kerugian dibanding dengan risiko rata-rata. Manusia itu terutama adalah bertanggung sendiri tapi juga pegawainya atau orang-orang sekitarnya. Contohnya: Bertanggung menyampaikan informasi yang tidak benar, kurang hati-hati, *arrogan*. Pegawainya *sabotase*, *vandalisme* (sengaja membakar orang-orang sekitar) dan atau kurang hati-hati. Ciri-ciri *moral hazard* adalah sulit diidentifikasi, namun kadang-kadang tercermin dari keadaan tertentu seperti: tidak rapi, tidak bersih, keadaan dimana

peraturan keamanan/kerja tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya (tidak disiplin). Ciri lain dari moral hazard adalah sulit diperbaiki/dirubah, karena menyangkut sifat, pembawa ataupun karakter manusia. Apabila *moral hazard* yang buruk menjurus pada bentuk penipuan atau kecurangan, permohonan pertanggung jawaban sebaiknya ditolak.

2.1.3.3 Solusi Mengatasi *Moral Hazard*

Untuk mengendalikan *moral hazard*, Dunham (2018) membuat sebuah permodelan. Model tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi rintangan/penghalang untuk melakukan *moral hazard*, maka semakin rendah frekuensi moral hazard. Kebutuhan adalah sesuatu yang universal, namun keadaan genting dan mendesak mampu mempengaruhi seseorang untuk melakukan hal tidak benar. Begitu juga dengan keserakahan (*greed*) adalah sesuatu yang berlaku universal, namun pada sebagian orang hal ini dapat dikendalikan. Faktor utama yang mengendalikan kedua hal ini adalah etika dan nilai-nilai moral yang dianut oleh seseorang. Etika moral seseorang dapat dibangun dengan menanamkan nilai-nilai kebenaran agama dan ketauhidan. Kepercayaan seseorang kepada hari pembalasan dimana semua yang dilakukan akan mendapatkan balasan, mampu mengendalikan keinginan tidak baik yang ada dalam dirinya.

2.1.4 Perilaku Oportunistik pada Penyusunan Anggaran

Istilah oportunistik berasal dari kata *opportunity* yang berarti kesempatan. Perilaku oportunistik mengacu pada pribadi, sifat atau dinamika kelompok dalam menghadapi suatu kondisi dimana dalam posisi tertentu merasa mempunyai kesempatan atau peluang lebih untuk melakukan sesuatu sesuai keinginan. Sularso (2018:5), perilaku oportunistik merupakan perilaku yang berusaha mencapai keinginan dengan segala cara bahkan cara ilegal sekalipun. Faktor yang mempengaruhi perilaku oportunistik adalah kekuatan (*power*) dan kemampuan (*ability*).

Perilaku oportunistik anggaran (*fiscal opportunism*), yaitu perilaku oportunistik dalam pembuatan keputusan alokasi belanja dan preferensi yang mengarah pada alokasi belanja yang dapat memberikan keuntungan pribadi juga keinginan untuk aman secara fiskal, yakni anggaran bisa terealisasi tepat waktu dan tepat jumlah, memiliki peluang untuk menambah alokasi saat perubahan APBD, dan Romarina (2019:37), bahwa kemungkinan variansi (selisih anggaran dan realisasi sampai akhir tahun) yang rendah. Perilaku oportunistik mengarah pada terjadinya *adverse selection* (menyembunyikan informasi) dan *moral hazard* (penyalahgunaan wewenang).

Ada dua kondisi yang dimanfaatkan oleh eksekutif untuk merealisasi perilaku oportunistiknya dalam proses penyusunan anggaran. Pertama, secara eksplisit berhubungan dengan anggaran legislatif dan kedua, melalui anggaran untuk pelayanan publik dalam bentuk “titipan”. Pada kondisi pertama, legislatif mengusulkan anggaran yang meningkatkan

penghasilannya sehingga dapat memenuhi *self-interest*nya dalam jangka pendek. Abdullah (2017:6) bahwa hal ini memunculkan *political corruption* atas anggaran dalam, sementara pada kondisi kedua, *self-interest* dalam jangka panjang ingin dicapai. Usulan anggaran yang diperjuangkan adalah yang mengharumkan nama politisi di wilayah tertentu, sehingga cenderung pada usulan yang *targetable* atau hasilnya kelihatan jelas oleh masyarakat. Akibatnya, pembangunan cenderung lebih diarahkan pada daerah yang merupakan wilayah pemilihan politisi yang *powerful* di legislatif.

Abdullah (2017:6) bahwa *political corruption* terjadi ketika politisi atau birokrat tingkat atas memanfaatkan kedudukan mereka demi keuntungan pribadi ataupun kalangan dekat mereka. Salah satu contohnya yaitu dengan mengalokasikan belanja untuk barang-barang khusus dan berteknologi tinggi karena merupakan belanja yang mudah dikorupsi sebab tidak banyak orang yang memahami barang tersebut. Insentif korupsi dalam sisi belanja anggaran pemerintah (Abdullah, 2017:7) adalah kurangnya standar etika dan moral, kemungkinan terdeteksi yang rendah, pengawasan dan sanksi yang lemah, atau ketidakcukupan gaji dan insentif lainnya.

Abdullah (2017:7) menyatakan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan bentuk pelayanan publik yang paling mendasar dan karenanya menjadi fokus utama pembelaan legislatif di pemerintahan. Namun, belanja untuk pendidikan dan kesehatan bukanlah area yang dapat memberikan peluang untuk korupsi sehingga anggaran pendidikan, kesehatan, dan sosial akan diperkecil.

Abdullah (2017:7) menunjukkan bahwa jenis-jenis belanja pemerintah membuka peluang terjadinya perilaku oportunistik, karena itu akan dipilih belanja barang atau pelayanan untuk program-program dan kegiatan yang sulit untuk dimonitor orang lain. Hasil penelitian ini dikuatkan oleh Abdullah (2017:7) bahwa belanja investasi publik lebih disukai legislatif karena dapat memberikan komisi lebih besar daripadabelanja untuk pelayanan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Dengan kata lain preferensi legislatif mengarah pada alokasi belanja yang dapat memberikan keuntungan pribadi lebih besar dan memiliki dampak politik jangka panjang.

Pengalokasian anggaran akan lebih banyak diarahkan untuk proyek infrastruktur karena lebih mudah digunakan sebagai bentuk pemenuhan janji legislatif kepada pemilihnya. Legislatif akan merekomendasi eksekutif untuk menaikkan alokasi pada sektor-sektor yang mendukung kepentingannya dan mengusulkan pengurangan alokasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan belanja publik lainnya yang tidak bersifat *job programs* dan *targetable*. Preferensi legislatif ini memiliki tiga kemungkinan konsekuensi pada alokasi anggaran untuk sektor lain, yaitu : (1) mengurangi alokasi untuk belanja lain apabila jumlah belanja secara keseluruhan tidak bertambah, (2) tidak merubah alokasi sektor lain jika jumlah belanja bertambah, atau (3) kombinasi keduanya, yakni alokasi untuk sektor lain berkurang walaupun jumlah belanja secara keseluruhan bertambah.

2.1.5 Pendapatan Asli Daerah

Bastian (2018), pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. Pendapatan daerah juga merupakan pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dan digali dari potensi pendapatan yang ada di daerah. Dengan kata lain pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas segala sumber-sumber atau potensi yang ada pada daerah yang harus diolah oleh pemerintah daerah didalam memperoleh pendapatan daerah.

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membagi Pendapatan Daerah 3 bagian yaitu :

- a. Pajak Asli Daerah bersumber dari:
 1. Pajak Daerah
 2. Retribusi Daerah
 3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
 4. Lain-lain PAD yang sah
- b. Dana Perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepala daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

2.1.6 Dana Alokasi Umum

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Darise, 2018).

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horisontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. DAU suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungan DAU-nya ditetapkan sesuai undang-undang. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD.

2.1.7 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 ayat 55, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah sisa lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran (Erlina, 2017). SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pelampauan penerimaan dan perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

SiLPA atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah suatu indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. Laporan Realisasi Anggaran didalamnya terdapat penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dapat berupa hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman dalam negeri, dan dari penerimaan kembali pinjaman yang pernah diberikan pemerintah daerah kepada pihak lain, sedangkan pengeluaran pembiayaan dapat berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri, dan pemberian pinjaman kepada pihak lain. Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan neto. Selisih antara Surplus/defisit dengan pembiayaan neto inilah yang disebut sebagai SiLPA (Halim, 2019:57).

Pasal 137 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 telah menetapkan bahwa SiLPA tahun sebelumnya yang merupakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk:

- 1) Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja.
- 2) Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

2.1.8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011 pasal 1 ayat 9, APBD didefinisikan sebagai berikut: “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah”.

Administrasi pendanaan urusan pemerintah daerah dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat di daerah, kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan menerima atau mengeluarkan uang. APBD mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan sebagaimana mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

2.1.9 Proses Penyusunan APBD

Penyusunan APBD merupakan proses penganggaran daerah dimana secara konseptual terdiri atas formulasi kebijakan anggaran

(*budget policy formulation*) dan perencanaan operasional anggaran (*budget operational planning*).

Sebagai bagian dari kebijakan anggaran, pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya yang sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kepada DPRD. RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

Setidaknya terdapat enam subproses dalam penyusunan anggaran APBD, yaitu penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), penyiapan Surat Edaran Kepala Daerah (SE KDH) tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD, penyusunan RKA SKPD, penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD, pembahasan Raperda APBD dan penyusunan Raper KHD Penjabaran APBD, evaluasi serta penetapan Raperda APBD dan Raper KDH Penjabaran APBD.

1. Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Seperti diketahui, setiap SKPD mengembangkan Renstra dengan mengambil program yang tercantum dalam RPJMD yang sesuai dengan bidangnya, pada kurun waktu tahun anggaran yang sama pula dengan yang tercantum dalam RPJMD. Renstra tersebut kemudian dikembangkan menjadi

Renja SKPD per tahun. Dokumen Renja tiap SKPD dikompilasikan oleh Pemda menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

KUA disusun berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Mendagri melalui SE Mendagri. Proses penyusunannya diawali dengan pembuatan rancangan awal KUA oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Rancangan awal KUA tersebut terdiri atas dua komponen utama:

- 1) Target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemda untuk setiap urusan pemerintah daerah.
- 2) Proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Program-program tersebut harus diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan pemerintah.

2. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

PPAS merupakan dokumen yang berisi seluruh program kerja yang dijalankan tiap urusan pada tahun anggaran, dimana pprogram kerja tersebut diberi prioritas sesuai dengan visi, misi, dan strategi Pemda. Sama seperti KUA, proses penyusunan PPAS diawali dengan rancangan awal PPAS oleh TAPD. Rancangan awal PPAS ini disusun berdasarkan Nota Kesepakatan KUA, dengan tahap sebagai berikut:

- 1) Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan
- 2) Menentukan urutan program untuk masing-masing urusan

3) Menentukan pafon anggaran untuk tiap program.

TAPD harus menentukan skala prioritas urusan yang disesuaikan dengan visi dan misi Pemda. Dalam menentukan skala prioritas ini. TAPD dapat menggunakan teknik-teknik *review and ranking* yang ada, baik yang berbasis statistik maupun tidak seperti penggunaan tabel *input-output* atau penggunaan metodologi *logical framework*.

3. Penyiapan Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD merupakan dokumen yang sangat penting bagi SKPD sebelum menyusun RKA. Setidaknya ada tiga dokumen dalam lampiran SE KDH yang dibutuhkan SKPD dalam menyusun RKA-nya, yaitu:

- 1) Dokumen KUA, yang memberikan rincian program dan kegiatan per SKPD.
- 2) Standar Satuan Harga, yang menjadi referensi dalam penentuan rincian anggaran di RKA.
- 3) Kode Rekening untuk tahu anggaran bersangkutan.

Selain KUA dan PPA, data tentang Analisis Standar Belanja, dokumen Standar Pelayanan Minimal, serta Standar Satuan Harga dibutuhkan dalam pembuatan rancangan awal SE KDH ini. Data Analisis Standar Belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan, sedangkan Standar

Satuan Harga merupakan harga satuan setiap unit barang/ jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan KDH.

4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. RKA SKPD disusun dengan berpedoman pada SE KDH tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD.

SKPD menyusun RKA SKPD menggunakan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah atau *Medium Term Expenditure Framework* (MTEF) daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Dokumen RKA SKPD terdiri atas Rincian Anggaran Pendapatan, Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung, Rincian Anggaran Belanja Langsung, Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung, Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah, dan Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

5. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah APBD

Dokumen sumber yang utama dalam penyiapan Raperda APBD adalah RKA SKPD. Oleh karenanya harus dipastikan bahwa setiap RKA SKPD telah disusun sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. Untuk menjamin hal itu, setelah TAPD mengumpulkan RKA SKPD dari tiap-tiap SKPD, TAPD harus membahas kesesuaian RKA SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dokumen perencanaan lainnya yang relevan,

target atau pencapaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta dokumen sinkronisasi program dan kegiatan antar-SKPD.

Proses selanjutnya adalah pengumpulan seluruh RKA yang telah dievaluasi oleh TAPD menjadi dokumen kompilasi RKA. Proses ini dilakukan oleh PPKD. Berdasarkan dokumen kompilasi tersebut, PPKD kemudian membuai lampiran-lampiran Raperda APBD yang terdiri atas:

- 1) Ringkasan APBD.
- 2) Ringkasan APBD (menurut urusan pemerintahan dan organisasi).
- 3) Rincian APBD (menurut urusan pemerintahan, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan).
- 4) Rincian Belanja (menurut urusan pemerintahan, organisasi, program dan kegiatan, dan keselarasan urusan dengan fungsi).

6. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah APBD

KDH menyampaikan Raperda tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Raper KDH Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi. Penyampaian tersebut dilakukan paling lambat tiga hari kerja setelah Raper KHD disusun dan disertai dengan:

- 1) Persetujuan bersama Pemda-DPRD terhadap Raperda APBD.
- 2) KUA dan PPA yang disepakati Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.
- 3) Risalah sidang jalannya pembahasan Raperda APBD.

- 4) Nota Keuangan dan pidato KDH perihya penyampaian pengantar Nota Keuanagn pada sidang DPRD.

Proses evaluasi ini dilakukan maksimal 15 hari kerja sejak penyerahaan dilakukan. Jika rancangan peraturan tersebut dinyatakan tidak lolos evaluasi, maka Pemda bersama DPRD harus melakukan penyempurnaan.

Raperda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang telah lolos proses evaluasi segera ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Penetapan tersebut dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil penelitian
1	Suartini (2016)	Determinan Perilaku <i>Opportunistic</i> Penyusun Anggaran Calon <i>Incumbent</i> Terkait Pilkada Serentak Tahun 2015.	Variabel <i>independen</i> yaitu PAD (X_1), DAK (X_2) dan Silpa (X_3), sedangkan variabel <i>dependent</i> yaitu Perilaku <i>Opportunistic</i> (Y).	Hasil penelitian yang diperoleh adalah perubahan PAD, DAK dan SiLPA berpengaruh positif pada perilaku <i>opportunistic</i> penyusun anggaran calon incumbent di Kabupaten/Kota se-Indonesia.
2	Gumiadi (2016)	Determinan Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran (Studi Pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur)	Variabel <i>independen</i> yaitu PAD (X_1), Silpa (X_2) dan DAU (X_3), sedangkan variabel <i>dependent</i> yaitu Perilaku Oportunistik (Y).	Berdasarkan hasil dari analisis penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama, pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran (OPA). Hasil dari hipotesis kedua sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran (OPA). Hasil dari hipotesis ketiga dana alokasi umum (DAU) mempunyai berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran (OPA).
3	Maryono	Pengaruh Perubahan	Variabel	Hasil pengujian hipotesis

	(2018)	Dana Alokasi Umum Terhadap Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah	<i>independen</i> yaitu DAU (X), sedangkan variabel <i>dependent</i> yaitu Perilaku Oportunistik (Y).	menunjukkan bahwa perubahan dana alokasi umum berpengaruh signifikan positif terhadap perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar $0.049 < 0,05$.
4	Megasari (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Selisih Lebih Perhitungan Anggaran Dan <i>Flypaper Effect</i> Pada Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran.	Variabel <i>independen</i> yaitu PAD (X ₁), Silpa (X ₂) dan <i>Flypaper Effect</i> (X ₃), sedangkan variabel <i>dependent</i> yaitu Perilaku Oportunistik (Y).	Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa hanya variabel SiLPA yang berpengaruh pada OPA, sedangkan PAD dan <i>Flypaper Effect</i> tidak berpengaruh.
5	Parwati (2017)	Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran.	Variabel <i>independen</i> yaitu PAD (X ₁), DAU (X ₂) dan SiLPA (X ₃), sedangkan variabel <i>dependent</i> yaitu Perilaku Oportunistik (Y).	Analisis data dengan metode regresi linier berganda membuktikan terdapat pengaruh positif PAD, DAU dan SiLPA pada perilaku oportunistik penyusun anggaran.

Sumber : Diolah Penulis 2021

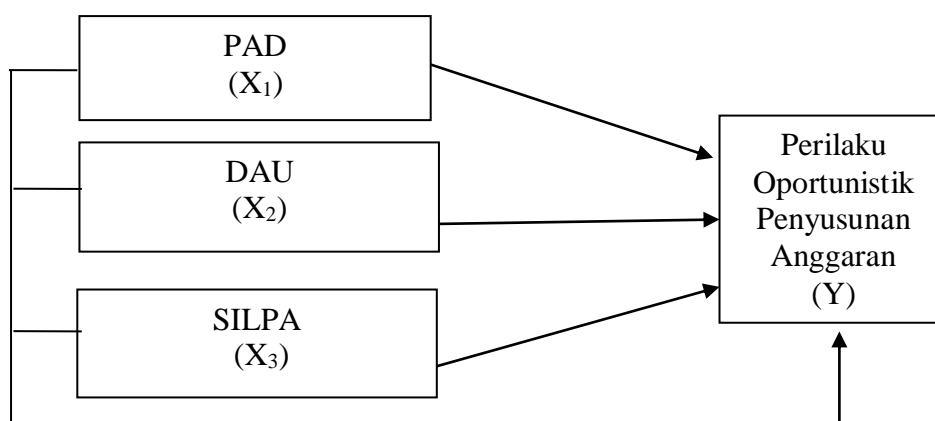
2.3 Kerangka Konseptual

Teori keagenan menjelaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan utilitasnya melalui pengalokasian sumber daya. Penganggaran menjadi mekanisme terpenting untuk pengalokasian sumber daya, karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah. Abdullah (2017:3) bahwa penganggaran sektor publik merupakan proses tawar menawar antara eksekutif dan legislatif.

Ketika besaran alokasi belanja untuk legislatif dikaitkan dengan kemampuan keunggulan daerah (diukur dari besaran PAD) secara tidak langsung memberi motivasi kepada legislatif untuk membuat misalokasi anggaran belanja. SiLPA juga bisa terjadi akibat asimetri informasi antara eksekutif dan legislatif. SiLPA ini memiliki pengaruh pada pengalokasian APBD periode selanjutnya,

karena SiLPA akan digunakan untuk menyeimbangkan anggaran yaitu dengan menutupi pengeluaran pembiayaan.

Sementara DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dari penjelasan di atas maka disusun kerangka konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Sumber : Diolah Penulis 2021

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kajian empiris di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. PAD berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran pada pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara.

2. DAU berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran pada pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara.
3. Silpa berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran pada pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara.
4. PAD, DAU dan Silpa secara simultan berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran pada pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif asosiatif yang merupakan penelitian yang dilakukan untuk mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Hubungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hubungan kausal yang bersifat sebab akibat, yang terdiri dari variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan dependen (variabel yang dipengaruhi).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Sumatera utara di website djk.depkeu.go.id

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan mulai dari bulan Juni 2021 sampai dengan September 2021, dengan format berikut:

Tabel 3.1
Skedul Proses Penelitian

No	Aktivitas	2021													
		Feb			Apr			Mei			Jun			Jul	
1	Pengajuan Judul	■													
2	Penyusunan Proposal				■	■	■								
3	Seminar Proposal									■					
4	Perbaikan Acc Proposal									■					
5	Pengolahan Data										■				
6	Penyusunan Skripsi										■	■	■		
7	Bimbingan Skripsi													■	
8	Meja Hijau														■

Sumber : Diolah Penulis, 2021

3.3 Definisi Operasional Variabel

3.3.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian mencakup variabel apa yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel bebas yaitu: variabel bebas pertama PAD (X_1), variabel bebas kedua DAU (X_2), variabel bebas ketiga Silpa (X_3), serta 1 (satu) variabel terikat yaitu perilaku oportunistik penyusunan anggaran (Y).

3.3.1 Definisi Operasional

Tujuan dari definisi operasional adalah agar dalam penelitian ini dijabarkan secara jelas definisi dari variabel independen dalam penelitian ini dan menguji pengaruh variabel independen tersebut terhadap variabel dependen.

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
1	PAD (X_1)	Pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. (Bastian, 2012).	$\frac{\text{PAD (t)} - \text{PAD (t-1)}}{\text{PAD (t-1)}} \times 100\%$	Rasio
2	DAU (X_2)	Dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (Darise, 2008).	$\frac{\text{DAU (t)} - \text{DAU (t-1)}}{\text{DAU (t-1)}} \times 100\%$	Rasio
3	Silpa (X_3)	Sisa lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. (Erlina, 2008).	$\frac{\text{Silpa (t)} - \text{Silpa (t-1)}}{\text{Silpa (t-1)}} \times 100\%$	Rasio
4	Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran	Perilaku yang berusaha mencapai keinginan dengan segala cara bahkan cara ilegal	$\text{OPA} = \Delta \text{Pdk} + \Delta \text{Kes} + \Delta \text{PU} + \Delta \text{Hibah} + \Delta \text{Bansos}$ Menghitung <i>spread</i> alokasi anggaran	Rasio

	(Y)	sekalipun. (Sularso, 2014).	<p>belanja dari APBD tahun berjalan ke tahun sebelumnya. Sektor yang diamati adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, hibah dan bansos, yaitu :</p> $\Delta \text{ Pdk} = \frac{\text{Pdk (t)} - \text{Pdk (t-1)}}{\text{Pdk (t-1)}} \times 100\%$ $\Delta \text{ Kes} = \frac{\text{Kes (t)} - \text{Kes (t-1)}}{\text{Kes (t-1)}} \times 100\%$ $\Delta \text{ PU} = \frac{\text{PU (t)} - \text{PU (t-1)}}{\text{PU (t-1)}} \times 100\%$ $\Delta \text{ Hibah} = \frac{\text{Hibah (t)} - \text{Hibah (t-1)}}{\text{Hibah (t-1)}} \times 100\%$ $\Delta \text{ Bansos} = \frac{\text{Bansos (t)} - \text{Bansos (t-1)}}{\text{Bansos (t-1)}} \times 100\%$
--	-----	--------------------------------	---

Sumber: Penulis (2021)

3.4 Populasi dan Sampel / Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 33 kabupaten/ kota untuk kurun waktu 2017-2019.

3.4.2 Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*) dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dapat berdasarkan pertimbangan (*judgement*) atau berdasarkan suatu kriteria tertentu yaitu:

- 1) Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang melaporkan secara rutin APBD dari Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum selama 3 tahun yaitu tahun 2017 – 2019.
- 2) Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang melaporkan secara rutin APBD tahun anggaran 2017 sampai 2019 yang mempublikasikan PAD, SiLPA, DAU, Belanja Hibah, dan Belanja Bansos.

Tabel 3.3 Populasi dan Sampel

No	Pemerintahan	Kriteria Pengambilan Sampel		Sampel
		1	2	
1	Kab. Asahan	√	√	1
2	Kab. Dairi	√	√	2
3	Kab. Deli Serdang	√	√	3
4	Kab. Tanah Karo	√	X	X
5	Kab. Labuhan Batu	√	X	X
6	Kab. Langkat	√	√	4
7	Kab. Mandailing Natal	√	√	5
8	Kab. Nias	√	X	X
9	Kab. Simalungun	√	√	6
10	Kab. Tapanuli Selatan	√	√	7
11	Kab. Tapanuli Tengah	√	X	X
12	Kab. Tapanuli Utara	√	√	8
13	Kab. Toba Samosir	√	√	9
14	Kota Binjai	√	X	X
15	Kota Medan	√	√	10
16	Kota Pematang Siantar	√	√	11
17	Kota Sibolga	√	√	12
18	Kota Tanjung Balai	√	X	X
19	Kota Tebing Tinggi	√	√	13
20	Kota Padang Sidempuan	√	X	X
21	Kab. Pakpak Barat	√	X	X
22	Kab. Nias Selatan	√	X	X
23	Kab. Humbang Hasundutan	√	√	14
24	Kab. Serdang Bedagai	√	X	X
25	Kab. Samosir	√	√	15
26	Kab. Batu Bara	√	X	X
27	Kab. Padang Lawas	√	X	X
28	Kab. Padang Lawas Utara	√	X	X
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	√	X	X
30	Kab. Labuhanbatu Utara	√	X	X
31	Kab. Nias Utara	√	X	X
32	Kab. Nias Barat	√	X	X
33	Kota Gunung Sitoli	√	X	X

Sumber : www.djpk.depkeu.go.id

Berdasarkan kriteria yang ditentukan dalam penelitian ini maka sampel diperoleh 15 Kabupaten/kota dari 33 Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

3.4.3 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain).

3.4.4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yaitu www.djpk.depkeu.go.id.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu metode mengumpulkan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

3.6 Teknik Analisis Data

Keseluruhan data yang terkumpul selanjutnya dianalisis untuk memberikan jawaban dari masalah yang dibahas dalam penelitian ini- Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan program SPSS. Metode data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistic.

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, dan skewness (kemencengan distribusi), sehingga secara kontekstual dapat lebih mudah dimengerti oleh pembaca.

3.6.2 Pengujian Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa sampel yang diteliti terbebas dari gangguan normalitas, multikolonieritas dan autokorelasi.

3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

Uji normalitas residual dilakukan dengan menggunakan Uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan tingkat signifikansi 5% (Erlina, 2017).

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Multikolonieritas terjadi dalam analisis

regresi berganda apabila variabel-variabel bebas saling berkorelasi yang dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *Variance Inflation Factor (VIF)*. Kedua ukuran tersebut menunjukkan variabel independen mana yang dijelaskan oleh variabel independen yang lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai *VIF* tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai $Tolerance < 0.10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$ (Erlina, 2017).

3.6.2.3 Uji Autokorelasi

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data *time series*, sehingga menggunakan pengujian autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periodet dengan kesalahan pengganggu pada periodet-1. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari nilai *Durbin Watson* pada *output* pengujian. Model regresi terbebas dari autokorelasi jika nilai *Durbin Watson* hitung terletak di daerah *no autocorrelation* atau tidak terletak di daerah *negative/positive autocorrelation*. Penentuan letak

tersebut dibantu dengan tabel dL dan dU, sesuai nilai K yang merupakan jumlah variabel. Apabila nilai *Durbin Watson* < 2, maka tidak terjadi autokorelasi (Erlina, 2017).

3.6.3 Analisis Regresi

Alat analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda untuk melihat ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Keterangan :

Y = Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran (*Dependent Variabel*)

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi Berganda (*Multiple Regression*)

X_1 = PAD (*Independent Variabel*)

X_2 = DAU (*Independent Variabel*)

X_3 = Silpa (*Independent Variabel*)

ϵ = Error term

3.6.4 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesa dilakukan untuk menguji kemampuan variabel independen (Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dalam mempengaruhi variabel dependen yaitu Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran. Secara

statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai statistik F dan nilai statistik t dan nilai koefisien determinasi (R^2).

3.6.4.1 Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel Independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Uji F dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada output hasil regresi menggunakan *Statistical Package for Social Science (SPSS)* dengan *significance level* 0,05 (5%). Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak(koefisien regresi tidak signifikan), yang berarti secara simultan variabel-variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis tidak dapat ditolak (koefisien regresi signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan variabel-variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

3.6.4.2 Uji parsial (Uji t)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Dasar pengambilan

keputusannya dilakukan dengan melihat nilai signifikansi t masing – masing variabel pada output hasil regresi dengan *SPSS* dengan tingkat signifikansi 0,05. Jika hasil regresi menunjukkan nilai signifikansi < 0,05, maka kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

3.6.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum, koefisien determinasi untuk data runtut waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara

Pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama *Gouvernement van Sumatra* dengan wilayah meliputi seluruh pulau Sumatera, dipimpin oleh seorang Gubernur yang berkedudukan di kota Medan. Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah (KND), Provinsi Sumatera kemudian dibagi menjadi tiga sub provinsi yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari tiga daerah administratif yang disebut keresidenan yaitu: Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur, dan Keresidenan Tapanuli.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia (R.I.) No. 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948, ditetapkan bahwa Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 15 April 1948 selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara. Pada awal tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Dengan Keputusan Pemerintah Darurat R.I. Nomor 22/Pem/PDRI pada tanggal 17 Mei 1949, jabatan Gubernur Sumatera Utara ditiadakan.

Selanjutnya dengan Ketetapan Pemerintah Darurat R.I. pada tanggal 17 Desember 1949, dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur. Kemudian, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara. Dengan Undang-Undang R.I. No. 24 Tahun 1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk Daerah Otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebahagian menjadi wilayah Provinsi Aceh.

Berikut ini akan dijelaskan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

a. Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Menjadi provinsi yang berdaya saing menuju Sumatera Utara sejahtera.

b. Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

- 1) Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religus dan berkompetensi tinggi.
- 2) Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional.
- 3) Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.
- 4) Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengolahan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

- 5) Reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (*good governance dan clean governance*).

4.1.2 Statistik Deskriptif

Setelah data yang digunakan terkumpul, maka langkah selanjutnya ialah menganalisis dan melakukan evaluasi terhadap data tersebut. Sebelum di analisis dan dievaluasi data terlebih dahulu diolah dengan menggunakan bantuan program SPSS (*Statistic Product and Service Solution*) yang kemudian hasil output tersebut akan dievaluasi untuk mengetahui variabel PAD, DAU, Silpa dan perilaku oportunistik penyusunan anggaran.

Tabel 4.1
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	45	-46.92	79.66	21.3496	27.88022
DAU	45	-45.98	99.18	12.2391	24.95518
SILPA	45	-1174.78	1473.31	47.7333	306.36892
Perilaku OPA	45	-398.17	582.13	83.8624	202.85847
Valid N (listwise)	45				

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2021)

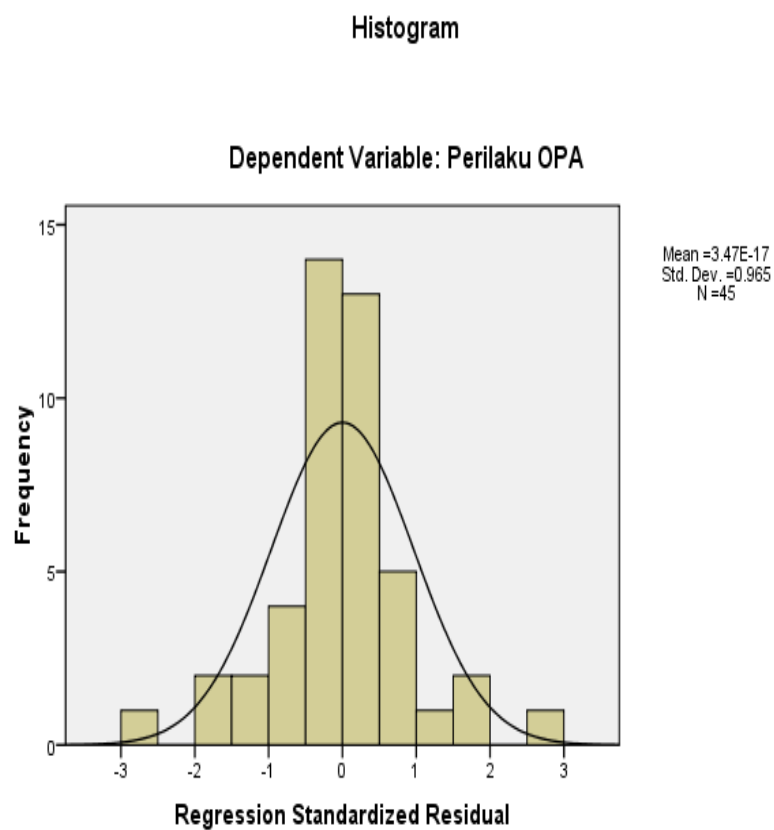
Pada tabel 4.1 di atas diketahui nilai rata-rata dari variabel PAD nilai minimum sebesar -46,92, maksimum sebesar 79,66, mean sebesar 21,3496 dan standar deviasinya adalah 27,88022. Variabel DAU nilai minimum sebesar -45,98, maksimum sebesar 99,18, mean sebesar 12,2391 dan standar deviasinya adalah 24,95518. Variabel SILPA nilai minimum sebesar -1174,74, maksimum sebesar 1473,31, mean sebesar 47,7333 dan standar deviasinya adalah 306,36892. Variabel perilaku OPA nilai minimum sebesar

-398,17, maksimum sebesar 582,13, mean sebesar 83,8624 dan standar deviasinya adalah 202,85847, dengan jumlah data sebanyak 45 data.

4.1.3 Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas data

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal.

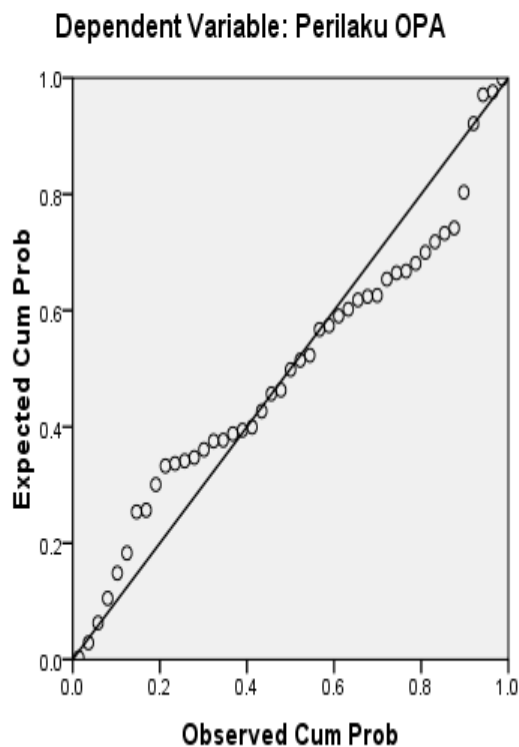


Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2021)

Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 4.1 diatas dengan melihat tampilan histogram uji normalitas di atas, dapat disimpulkan bahwa histogram menunjukkan pola distribusi normal.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Gambar 4.2 PP Plot Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 4.2 di atas, kemudian untuk hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan gambar PP Plot terlihat titik-titik data yang menyebar berada di sekitar garis diagonal sehingga data telah berdistribusi secara normal.

Untuk lebih memastikan apakah data disepanjang garis diagonal tersebut berdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan uji Kolmogorov Smirnov (1 Sample KS) yakni dengan melihat data residualnya apakah distribusi normal atau tidak. Jika nilai *Asym.sig* (2-tailed) > taraf nyata ($\alpha = 0.05$) maka data residual berdistribusi normal.

Tabel 4.2
Uji Normalitas *One Sample Kolmogorov Smirnov Test*
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.75106160E2
Most Extreme Differences	Absolute	.140
	Positive	.140
	Negative	-.127
Kolmogorov-Smirnov Z		.936
Asymp. Sig. (2-tailed)		.345
a. Test distribution is Normal.		

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2021)

Pada tabel 4.2 di atas, dapat dilihat bahwa hasil pengolahan data tersebut, besar nilai signifikansi *kolmogrov Smirnov* sebesar 0,345 maka dapat disimpulkan data terdistribusi secara normal, dimana nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05 ($p = 0,345 > 0,05$).

Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nilai – nilai observasi data telah terdistribusi secara normal dan dapat dilanjutkan dengan uji asumsi klasik lainnya.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat ada tidaknya hubungan linear diantara variabel bebas dalam model regresi. Hasil pengujian multikolinearitas dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3
Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error			Tolerance	VIF
1 (Constant)	48.073	36.018	1.335	.189		
PAD	-.683	1.001	-.682	.499	.960	1.041
DAU	3.421	1.115	3.068	.004	.966	1.035
SILPA	.178	.090	1.986	.054	.991	1.009

a. Dependent Variable: Perilaku OPA

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2021)

Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa semua variabel bebas tidak terkena masalah multikolinearitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai VIF < 10 dan *Tolerance* > 0,10. Untuk variabel PAD memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,960 dan VIF sebesar 1,041. Variabel DAU memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,966 dan VIF sebesar 1,035. Variabel SILPA memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,991 dan VIF sebesar 1,009.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu periode t dengan kesalahan periode $(t-1)$ atau sebelumnya. Penentuan ada tidaknya autokorelasi dapat digunakan dengan uji *run test*. Dasar pengambilan keputusan dalam uji *run test* yaitu :

- 1) Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih kecil < dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi.

- 2) Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar > dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

Tabel 4.4
Uji Autokorelasi
Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.72860
Cases < Test Value	22
Cases >= Test Value	23
Total Cases	45
Number of Runs	22
Z	-.298
Asymp. Sig. (2-tailed)	.765

a. Median

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2021)

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,765 > dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

4.1.4 Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU dan Silpa terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran.

Tabel 4.5
Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error			Tolerance	VIF
1 (Constant)	48.073	36.018	1.335	.189		
PAD	-.683	1.001	-.682	.499	.960	1.041
DAU	3.421	1.115	3.068	.004	.966	1.035
SILPA	.178	.090	1.986	.054	.991	1.009

a. Dependent Variable: Perilaku OPA

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2021)

Tabel 4.5 pada kolom *unstandardized coefficients* beta dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 48,073 - 0,683 X_1 + 3,421 X_2 + 0,178 X_3$$

Interpretasi dari persamaan regresi linier berganda adalah:

- a. Jika segala sesuatu pada variabel-variabel bebas dianggap tidak ada maka perilaku oportunistik penyusunan anggaran (Y) adalah sebesar 48,073%.
- b. Jika terjadi peningkatan PAD sebesar 1%, maka perilaku oportunistik penyusunan anggaran (Y) akan menurun sebesar 0,683%.
- c. Jika terjadi peningkatan DAU sebesar 1%, maka perilaku oportunistik penyusunan anggaran (Y) akan meningkat sebesar 3,421%.
- d. Jika terjadi peningkatan Silpa sebesar 1%, maka perilaku oportunistik penyusunan anggaran (Y) akan meningkat sebesar 0,178%.

4.1.5 Uji Hipotesis

a. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

Tabel 4.6
Uji Simultan
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	461533.194	3	153844.398	4.675	.007^a
Residual	1349135.356	41	32905.740		
Total	1810668.551	44			

a. Predictors: (Constant), SILPA, DAU, PAD

b. Dependent Variable: Perilaku OPA

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2021)

Berdasarkan tabel 4.6 perhitungan uji F dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} adalah $4,675 > F_{tabel}$ 2,83, dengan signifikansi $0,007 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu PAD, DAU dan Silpa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran pada pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara.

b. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji secara parsial (Uji t) dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

Tabel 4.7
Uji Parsial
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Tolerance	VIF
1	(Constant)	48.073	36.018	1.335	.189		
	PAD	-.683	1.001	-.682	.499	.960	1.041
	DAU	3.421	1.115	3.068	.004	.966	1.035
	SILPA	.178	.090	1.986	.054	.991	1.009

a. Dependent Variable: Perilaku OPA

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2021)

Berdasarkan tabel 4.7 untuk mengetahui pengaruh variabel independen PAD, DAU dan Silpa secara parsial terhadap variabel dependen perilaku oportunistik penyusunan anggaran adalah sebagai berikut :

- 1) PAD memiliki t_{hitung} (-0,682) $< t_{tabel}$ (2,019) dan signifikan $0,499 > 0,05$. Artinya secara parsial PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran pada

pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara.

- 2) DAU memiliki $t_{hitung} (3,068) > t_{tabel} (2,019)$ dan signifikan $0,004 > 0,05$. Artinya secara parsial DAU berpengaruh signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran pada pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara.
- 3) SILPA memiliki $t_{hitung} (1,986) < t_{tabel} (2,019)$ dan signifikan $0,054 > 0,05$. Artinya secara parsial SILPA tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran pada pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara.

c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel PAD, DAU dan Silpa terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Nilai *Adjusted R Square* yang mendekati satu berarti variabel independen penelitian memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel perilaku oportunistik penyusunan anggaran. Pada penelitian ini digunakan *Adjusted R Square*, karena variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari satu. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat dalam tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8
Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.505 ^a	.255	.200	181.39939

a. Predictors: (Constant), SILPA, DAU, PAD

b. Dependent Variable: Perilaku OPA

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2021)

Dari tabel 4.8 koefisien determinasi di atas, dapat dilihat bahwa Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,200. Hasil perhitungan statistik ini berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi perubahan variabel dependen sebesar 20,0%, sedangkan sisanya sebesar 80,0% (100% - 20,0%) diterangkan oleh faktor-faktor lain di luar model regresi yang dianalisis. Nilai *Adjusted R Square* adalah 0,200 yang artinya 20,0% pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel dalam penelitian ini dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti seperti dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan lain-lain.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh PAD Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa $t_{hitung} (-0,682) < t_{tabel} (2,019)$ dan signifikan $0,499 > 0,05$. Artinya secara parsial PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran pada pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara.

Hasil analisis ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Megasari (2017), dimana PAD tidak berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran. Sedangkan hasil analisis ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suartini (2016), Gumiadi (2016), Maryono (2018) dan Parwati (2017), dimana PAD berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran.

PAD berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran, dilihat dari uji parsial regresi linear berganda apabila PAD meningkat 1% maka perilaku oportunistik menurun 0.683% dan dilihat dari data tahun ke tahun lebih banyak daerah-daerah di Sumatera Utara yang mengalami peningkatan. Peningkatan PAD juga mempengaruhi alokasi belanja sektor-sektor tertentu yang dapat yang harusnya memberikan manfaat untuk pembangunan dan kemakmuran daerah. Interpretasi peningkatan PAD bukan menjadi area yang leluasa bagi para penyusunan anggaran untuk melakukan perilaku oportunistik, dimana daerah dengan PAD yang rendah kemungkinan disebabkan oleh sumber daya daerah yang baru kurang digali, akan lebih baik jika masing-masing daerah meningkatkan jumlah PAD dengan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dengan terus menggali potensi daerah agar dapat dimanfaatkan. Peningkatan PAD berpengaruh terhadap alokasi belanja sektor-sektor tertentu yang jika dilihat dari *Agency Theory* adanya kecenderungan untuk perilaku meminta meningkatkan alokasi sumber daya pada penetapan anggaran sektor publik yang dilakukan oleh para pelaku yang memproses anggaran dengan adanya asumsi sifat manusia yaitu *self-interest*.

4.2.2 Pengaruh DAU Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa $t_{hitung} (3,068) > t_{tabel} (2,019)$ dan signifikan $0,004 > 0,05$. Artinya secara parsial DAU berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran pada pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara.

Hasil analisis ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maryono (2018), dimana DAU berpengaruh negatif terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran. Sedangkan hasil analisis ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Parwati (2017), dimana DAU berpengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran.

DAU memiliki pengaruh positif signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran, dimana daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang tinggi namun keperluan fiskalnya rendah akan mendapatkan alokasi DAU yang relatif rendah. Kebalikannya, daerah yang kapasitas fiskalnya rendah tetapi keperluan fiskalnya tinggi akan mendapatkan DAU yang relatif tinggi, maka dengan demikian, DAU memiliki pengaruh negatif terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran.

Eksekutif mengajukan anggaran yang dapat memperbesar *agency*-nya, baik dari segi finansial maupun nonfinansial. Secara implisit menyatakan bahwa anggaran juga dipergunakan oleh legislatif (politisi) untuk memenuhi *self-interest* nya. Pada akhirnya keunggulan informasi yang dimiliki oleh

eksekutif yang dipergunakan untuk menyusun rancangan anggaran akan berhadapan dengan keunggulan kekuasaan (*discretionary power*) yang dimiliki oleh legislatif. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya masalah keagenan antara prinsipal dan agen.

4.2.3 Pengaruh SILPA Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa $t_{hitung} (1,986) < t_{tabel} (2,019)$ dan signifikan $0,054 > 0,05$. Artinya secara parsial SILPA tidak berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran pada pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara.

Hasil analisis ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Megasari (2017), dimana SILPA berpengaruh positif tidak signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran. Sedangkan hasil analisis ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suartini (2016), Gumiadi (2016) dan Parwati (2017), dimana SILPA berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran.

SILPA juga terjadi akibat adanya *Information Asymmetry*, yaitu suatu kondisi di mana ada ketidak seimbangan perolehan informasi antara pihak eksekutif sebagai penyedia informasi dengan pihak legislatif pada umumnya sebagai pengguna informasi (*user*). Adanya peningkatan SILPA inimenandakan anggaran yang direalisasikan tidak tercapai dari anggaran daerah yang diusulkan. Hal ini menyebabkan sebagai masyarakat menduga

adanya kejanggalan terhadap pengrealisasikan anggaran daerah. Yang bias juga terdapat dugaan adanya perilaku oportunistik. Tetapi SILPA tidak termasuk kedalam sumber penerimaan pemerintah daerah yang dapat diperuntukkan bagi belanja infrastruktur, pengadaan aset atau melaksanakan kegiatan yang tidak menyentuh masyarakat secara langsung. SILPA bisa dimanfaatkan dalam membiayai program lanjutan atas beban belanja langsung dan membiayai tanggungjawab lainnya sampai masa akhir anggaran yang belum sempat terselesaikan secara utuh. Jumlah SILPA akan dialokasikan untuk kegiatan belanja langsung dimana digunakan untuk belanja demi kesejahteraan masyarakat sehingga meminimalisir peluang bagi para penyusun anggaran dalam melakukan perilaku oportunistik melalui SILPA. Dengan demikian, SILPA berpengaruh positif tetapi tidak pengaruh signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran.

4.2.4 Pengaruh PAD, DAU dan SILPA Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa F_{hitung} adalah $4,675 > F_{tabel}$ 2,83, dengan signifikansi $0,007 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu PAD, DAU dan Silpa secara simultan berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran pada pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara dengan nilai *Adjusted R Square* 20%.

Hasil analisis ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suartini (2016), Gumiadi (2016), Maryono (2018) dan Parwati (2017), dimana PAD, DAU dan Silpa berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran. Sedangkan hasil analisis ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Megasari (2017), dimana PAD, DAU dan Silpa tidak berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran.

Pendapatan asli daerah juga merupakan pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dan digali dari potensi pendapatan yang ada di daerah. Dengan kata lain pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas segala sumber-sumber atau potensi yang ada pada daerah yang harus diolah oleh pemerintah daerah didalam memperoleh pendapatan daerah. Dalam penentuan PAD legislatif akan mendorong eksekutif untuk selalu meningkatkan target sehingga dapat meningkatkan alokasi untuk program yang mendukung kepentingannya. Hal ini ditengarai sebagai perilaku oportunistik, dimana ketika besaran alokasi belanja untuk legislatif dikaitkan dengan kemampuan keunggulan daerah (diukur dari besaran PAD) secara tidak langsung memberi motivasi kepada legislatif untuk membuat misalokasi anggaran belanja

Kenaikan jumlah DAU dapat dimanfaatkan sebagai ruang untuk mengusulkan alokasi belanja yang baru, yang bisa berbeda dengan prioritas pengalokasian pada tahun sebelumnya. Peluang perilaku oportunistik lain ditengarai juga terjadi pada sumber pendapatan daerah yang berbentuk dana transfer pemerintah pusat, contohnya adalah Dana Alokasi Umum (DAU). DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan

dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. DAU berperan sebagai pemerata fiskal antardaerah (*fiscal equalization*) dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah.

SILPA juga bisa terjadi akibat asimetri informasi antara eksekutif dan legislatif. SILPA ini memiliki pengaruh pada pengalokasian APBD periode selanjutnya, karena SILPA akan digunakan untuk menyeimbangkan anggaran yaitu dengan menutupi pengeluaran pembiayaan. Jika tidak diperhatikannya jangka waktu penetapan perubahan APBD, yang biasanya dilakukan beberapa bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran. Hal ini menjadikan anggaran tidak efektif atau bahkan tidak terserap sepenuhnya saat tahun anggaran berakhir, dan berdampak pada tingginya SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran), dimana dana yang seharusnya dapat digunakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat ternyata tidak terserap sepenuhnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. PAD berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran pada pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara. Artinya PAD bukan merupakan area yang leluasa bagi para penyusun anggaran dalam melakukan perilaku oportunistik.
2. DAU berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran pada pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara. Artinya daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang tinggi namun keperluan fiskalnya rendah akan mendapatkan alokasi DAU yang relatif rendah. Kebalikannya, daerah yang kapasitas fiskalnya rendah tetapi keperluan fiskalnya tinggi akan mendapatkan DAU yang relatif tinggi yang dipergunakan oleh legislatif (politisi) untuk memenuhi *self-interest* nya.
3. Silpa berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran pada pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara. Artinya Jumlah SILPA mengidentifikasi bahwa belum maksimalnya penggunaan APBD guna meningkatkan perekonomian, pelayanan untuk daerah yang akan dialokasikan untuk kegiatan belanja dimana digunakan demi kesejahteraan

masyarakat hal ini menjadi memungkinkan ada peluang bagi para penyusun anggaran dalam melakukan perilaku oportunistik melalui SILPA.

4. PAD, DAU dan Silpa secara simultan berpengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran pada pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, penulis memberikan saran kepada peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk pembuat kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah bahwasanya pemerintah harus lebih berhati-hati dalam menerbitkan peraturan perundangan yang baru terkait dalam penganggaran daerah berbasis kinerja.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lain yang mungkin dapat mempengaruhi OPA yang dapat dihasilkan oleh pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara dan periode tahun penelitian yang digunakan dapat ditambah menjadi 3 tahun atau lebih

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. dan Asmara, J.A, 2017. Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. *Makalah Simposium Nasional Akuntansi 9*.
- Aranta, Petra Zulia;. 2018. Pengaruh Moralitas Aparat Dan Asimetris Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. 3.
- Arthaswadaya, Agum. 2017. Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Budgetary Slack dengan Self Esteem sebagai Variabel Pemoderasi. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Asak, P. Rani Adnyani. 2018. Kemampuan Asimetri Informasi, Ketidakpastian Lingkungan, Budget emphasis, dan Kapasitas Individu Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Partisipasi Anggaran Pada Budgetary Slack (Studi Kasus Pada SKPD Di Kabupaten Badung). Tesis, Program Studi Akuntansi Universitas Udayana Denpasar.
- Bastian, Indra, 2018. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Kedua. Salemba Empat. Jakarta.
- Darise, Nurlan, 2018. Akuntansi Keuangan Daerah, Indeks, Edisi Pertama. Jakarta.
- Erlina, Sri Mulyani, 2017. *Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Cetakan Pertama, USU Press, Medan.
- Erlina, 2017. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*. USU Press : Medan.
- Gumiadi, Aan. 2016. Determinan Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran (Studi Pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah, 2019. “Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi”. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* Volume 2, Nomor 1, hal 53-64.
- Irawan, I. (2020). Perencanaan Keuangan Dan Manajemen Biaya Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Langkat Sumatera Utara. *IHSAN: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 2(2), 278-289.
- Khamilah, O. (2022). Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Koperasi Mekar Mulia Melalui Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Berdasarkan SAK ETAP. *Pelita Masyarakat*, 3(2), 107-117.

- Kasper, Wolfgang; Streit, Manfred E;. 2019. *Institutional Economics* (2 ed.). Edward Elgar Publishing.
- Latifah, Nurul, 2018. Adakah Perilaku Oportunistik Dalam Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik? *Is there of Opportunistic Behavior on the Agency Theory Aplication in the Public Sector*. Fokus Ekonomi Volume 5 No. 2 Desember 2010 : 85-94
- Maryono, Riky. 2018. Pengaruh Perubahan Dana Alokasi Umum Terhadap Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah. Universitas Negeri Padang.
- Megasari, Ida Ayu Gede Sutha. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Selisih Lebih Perhitungan Anggaran Dan *Flypaper Effect* Pada Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran. Universitas Udayana, Bali, Indonesia.
- Milanie, F., Sari, A. K., & Saputra, H. (2020). An Effect of Empowerment Organizational Structure and Job Design Employee Effectiveness Work in the Office Directors of PTPN II Tanjung Morawa. *International Journal of Management*, 11(5).
- Nasution, D. A. D., Nasution, A. P., & Alpi, M. F. (2019, August). Pengaruh Penerapan Smart ASN Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara di Era Disrupsi Teknologi Indonesia 4.0. In *Seminar Nasional Sains dan Teknologi Informasi (SENSASI)* (Vol. 2, No. 1).
- Parwati, S.M, 2017. Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran. Universitas Udayana.
- Romarina, A. dan A. Makfatih. 2018. Faktor – Faktor Risiko Fiskal dan Penganggaran Daerah. *Jurnal BPPK Volume I*.
- Suartini, Ni Kadek Ayu. 2016. Determinan Perilaku *Opportunistic* Penyusun Anggaran Calon *Incumbent* Terkait Pilkada Serentak Tahun 2015. Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia.
- Sugiyono, 2018, *Metode Peneiltian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sularso, Havid, Yanuar E. Restianto dan Astarti Elka Istiqomah. 2018. Determinan Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran (Studi Pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Makalah Simposium Nasional Akuntansi 17 Mataram, Lombok*.

djpk.depkeu.go.id

<https://sumatra.bisnis.com/read/20200507/534/1237623/realisasi-pendapatan-sumut-2019-rp1308-triliun-2020-diproeksi-lebih-rendah>

<https://www.liputan6.com/regional/read/4230753/apbd-kota-medan-berkurang-hingga-40-persen-dampak-pandemi-covid-19#>

<https://sumut.antaranews.com/berita-sumut>